ABSTRAK

Masifnya dampak buruk bencana merupakan salah satu imbas dari perencanaan antisipatif yang minim oleh lembaga terkait di Indonesia. Sebagian besar langkah pemerintah merupakan upaya responsif, sebagai jawaban atas kebutuhan yang muncul pasca-bencana. Pasca-tsunami 2004, Indonesia dan Asia Pasifik mulai membenahi sistem mitigasi bencana pada daerah-daerah rawannya. Pemerintah mulai memberlakukan standar keamanan, dan juga membentuk badan tanggap bencana lokal (BPBD) pada daerah yang dipercaya rawan bencana. Namun demikian, perencanaan yang tak selalu ditanggapi apresiasi penuh dari masyarakat sebagai objek perencanaan, menjadikan tingkat keberhasilan kebijakan pemerintah menjadi rendah.

Bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan salah satu bencana yang paling tersorot publikasinya selama sejarah kebencanaan. Kejadian yang belum terprediksi ini berdampak pada ketidaksiapan pemerintah dalam meminimalisir kerugian yang timbul. Pemerintah melalui badan teknis terkait lalu menginisiasi berjalannya program mitigasi bencana berbasis masyarakat pada wilayah terdampak bencana. Muatan mitigasi bencana diberikan melalui edukasi yang diterima warga masyarakat terdampak, pada saat berjalannya rekonstruksi pemulihan kondisi lingkungan. Tujuan dari diterapkannya sistem mitigasi bencana ini adalah agar masyarakat lebih merasa memiliki dan membutuhkan hasil program.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar penerimaan masyarakat terhadap program mitigasi bencana berbasis masyarakat. Penerimaan disini merupakan kesenjangan antara hasil program ideal dengan penerapannya di lapangan. Sasaran penelitian ini merupakan program-program bermuatan mitigasi bencana oleh pemerintah dengan pendekatan partisipatif. Penelitian mengambil tempat pada kawasan dengan dampak terparah dalam kejadian bencana erupsi Merapi 2010, yaitu Kecamatan Cangkringan, yang juga merupakan kecamatan dengan jumlah program bermuatan mitigasi bencana terbanyak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terkait dengan kondisi fisik lingkungan, sosial masyarakat, kondisi sarana dan prasarana kebencanaan, capaian program serta data persepsi masyarakat atas program. Teknik analisis yang akan digunakan meliputi analisis kualitatif berdasarkan hasil *in-depth interview* dengan narasumber.

Hasil penelitian adalah bahwa mitigasi bencana berbasis masyarakat merupakan sebuah bentuk perencanaan yang dinamis, dan formatnya berbeda pada tiap lokasi diterapkannya program, karena harus selalu menyesuaikan dengan karakter fisik, bencana yang terjadi, kondisi masyarakat, serta norma yang berlaku di dalamnya. Sedangkan, tingkat penerimaan masyarakat di wilayah studi merupakan sebuah bentuk apresiasi positif yang dominan, dengan beberapa kelompok marjinal yang masih belum dapat menerima program dengan baik.

Kata kunci: mitigasi bencana, partisipasi masyarakat, tingkat penerimaan masyarakat